

Penyusunan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Islami Siswa Pada Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri Sidoarjo

Azi Sakti

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
azisakti155@gmail.com

Triana Rosalina Noor

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
trianasuprayoga@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the process of formulating education policies to strengthen students' Islamic character at Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri Sidoarjo. This research uses a qualitative method with a case study approach. The selection of research subjects used purposive sampling of four people, namely the Head of the Madrasah, Deputy Head of the Madrasah for Student Affairs, Teachers and Chair of the Committee. The data collection method uses observation, interviews and documentation methods, which are then analyzed through the stages of condensation, data presentation and drawing conclusions. The results indicate that the formulation of education policies to strengthen students' Islamic character at Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri Sidoarjo has been implemented effectively through the process of preparing policy formulation, policy implementation and policy evaluation. At the policy formulation stage, the madrasah carries out a consensus by involving several related parties in order to develop an appropriate character education program in accordance with the madrasah's vision and mission. At the policy implementation stage, the madrasah through the school principal delegates responsibility for implementing the character education program to related parties so they can start implementing the program according to their respective capacities. After that, a policy evaluation was carried out both at the implementing level in the field and the achievement of program effectiveness indicators.

Keywords: education policy, Islamic character, Student

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang proses penyusunan kebijakan penguatan pendidikan karakter Islami siswa di MI Hasyim Asy'ari Bangsri, Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pemilihan subjek penelitian menggunakan purposive sampling sebanyak empat orang yakni Kepala madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bid.Kesiswaan, Guru dan Ketua Komite. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis melalui tahapan kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan penguatan pendidikan karakter Islami siswa di Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri Sidoarjo telah

diterapkan dengan efektif melalui proses menyusun formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada pada tahap formulasi kebijakan, pihak madrasah melakukan konsensus dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam rangka menyusun program pendidikan karakter yang tepat sesuai dengan visi dan misi madrasah. Pada tahap implementasi kebijakan, pihak madrasah melalui kepala sekolah mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaan program pendidikan karakter kepada pihak terkait untuk bisa mulai menerapkan program sesuai dengan kapasitas masing-masing. Setelah itu, dilakukan evaluasi kebijakan baik pada level pelaksana di lapangan maupun ketercapaian indikator efektivitas program.

Kata Kunci: Kebijakan pendidikan, karakter Islami, siswa

Pendahuluan

Pembentukan karakter penting untuk ditanamkan sejak dini melalui pendidikan informal dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Karakter yang terbentuk sejak usia muda cenderung lebih kokoh, sehingga ketika dewasa, individu tersebut tidak mudah tergoda atau terpengaruh oleh hal-hal negatif.¹ Pendidikan karakter yang tepat menjadi salah satu solusi atas permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan yang belakangan ini menjadi keresahan bersama dapat teratasi, terlebih pada lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah. Hal ini dikarenakan melalui sistem pendidikan yang menekankan pada karakter siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing maka akan dihasilkan generasi yang unggul dan berkarakter Islami.²

Penerapan pendidikan karakter di sebuah lembaga pendidikan sebagaimana madrasah, tidak terlepas dari peran seorang kepala madrasah selaku pemimpin yang memiliki posisi kunci dalam mewujudkan dan membangun institusi pendidikan yang bermutu tinggi. Peran tersebut salah satunya terkait dengan penyusunan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan suasana keagamaan yang kondusif di lembaga yang dipimpin.³ Terdapat beberapa kebijakan yang disusun untuk menciptakan lingkungan madrasah yang bernuansa religius diantaranya adalah kebijakan untuk penguatan karakter Islami siswa melalui aktivitas membaca, menulis serta menghafal Al-Quran. Melalui cara ini, madrasah dapat memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya.⁴

¹ Triana Rosalina Noor, 'Penanganan Perilaku Membolos Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan, Sidoarjo', *Conseils: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 2 (2024): 3, <https://doi.org/10.55352/bki.v4i2.659>.

² Siti Rodiah and Triana Rosalina Noor, 'Strategi Pengembangan Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Pendidikan KeIslaman Unggulan', *IDEALITA: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2024): 122.

³ Ilham, "Kebijakan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar," *Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (Agustus, 2021): 154–161.

⁴ Triana Rosalina Noor, 'The Strategy of Private Madrasah Tsanawiyah in Responding to Educational Challenges', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 8, no. 2 (2024): 665, <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i2.561>.

Review of Education Studies
Vol 1, No 2, Desember 2024, ISSN 3064-4321

Kebijakan sebuah instrumen yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan atas arahan yang jelas dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dalam rangka untuk memastikan adanya konsistensi dan koherensi dalam tindakan organisasional atau institusional.⁵ Setiap kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan pada suatu kebutuhan sebagai dasar pertimbangan. Tujuannya adalah agar setiap kebijakan yang telah ditetapkan bisa membawa dampak positif pada lembaga. Penentuan kebijakan tersebut biasanya diawali dengan proses identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.⁶

Selain itu, Syafarudin mengidentifikasi bahwa terdapat tiga elemen kunci dalam sebuah kebijakan pendidikan yakni formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketiga proses ini bukan merupakan langkah-langkah yang terpisah, melainkan membentuk sebuah rangkaian yang berkelanjutan dalam proses pengelolaan kebijakan. Melalui pendekatan yang bersifat siklus ini, kebijakan pendidikan karakter dapat secara konsisten diperbarui dan diselaraskan sesuai dengan temuan evaluasi dan dinamika keadaan yang berkembang.⁷

Pengembangan karakter siswa di madrasah juga tidak terlepas dari kebijakan yang madrasah yang diterapkan. Kerap kali ditemukan permasalahan di madrasah bahwa masih ada siswa kurang menghargai etika dan nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat.⁸ Permasalahan tersebut dapat bisa diminimalisasi dengan adanya penguatan pendidikan karakter pada siswa baik itu dalam lingkup keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.⁹

Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri, Sidoarjo merupakan salah satu pelaksana pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama yang diharapkan mampu menjadi sebuah media dalam melaksanakan tujuan dari pendidikan karakter. Madrasah ini mengusung visi untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta cinta terhadap lingkungan. Adapun konsep dari pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang diterapkan tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan di lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut disusun dengan baik melalui keterlibatan beberapa pihak agar mampu mengoptimalkan penerapan penguatan pendidikan karakter secara komprehensif.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan bahwa implementasi pendidikan karakter di sebuah sekolah tidak akan berjalan efektif manakala penyusunan kebijakan program pendidikan karakter tidak berjalan baik.¹⁰ Sebuah kebijakan pendidikan yang tepat adalah sebuah kebijakan yang mengakomodir kebutuhan pengguna dan bisa

⁵ Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, ed. Alviana Cahyanti (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019).

⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 16.

⁷ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).18

⁸ Sofia Nur, Purwanto Purwanto, and Rochmat Budi Santoso, 'Tata Kelola Pembentukan Karakter Siswa Di Madrasah Kota Magelang', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 881, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2662>.

⁹ Farid Setiawan et al., 'Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam', *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.23971/mdr.v4i1.2809>.

¹⁰ Enggar Dista Pratama, 'Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Di SMK Negeri 2 Pengasih', *E-Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif-S1* 23, no. 1 (2018): 13.

menjawab tantangan dan tuntutan peradaban.¹¹ Setiap lembaga pendidikan penting untuk menguatkan kompetensi lulusan melalui berbagai aktivitas¹² dan juga penguatan kompetensi melalui penguatan karakter.¹³ Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana penyusunan kebijakan penguatan pendidikan karakter Islam siswa di MI Hasyim Asy'ari Bangsri, Sidoarjo.

Landasan Teori

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan memiliki berbagai interpretasi dan padanan, mencakup serangkaian konsep seperti strategi politik, regulasi, inisiatif, keputusan resmi, legislasi, peraturan pemerintah, perjanjian, pedoman, kesepakatan bersama, serta perencanaan strategis lainnya.¹⁴

Kebijakan memiliki beragam makna dan penerapan yakni: keahlian, sikap bijaksana dalam menghadapi situasi, serangkaian gagasan dan prinsip yang mendasari suatu perencanaan dalam menjalankan tugas, metode yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi dalam memimpin atau mengambil tindakan, dan pernyataan yang mencerminkan aspirasi, sasaran, dan nilai-nilai fundamental.¹⁵ Kebijakan dapat diartikan sebagai pernyataan lisan atau tertulis yang berfungsi sebagai pedoman umum. Pedoman ini menentukan batasan dan arah bagi para manajer dalam bertindak. Lebih dari sekadar saran, kebijakan menetapkan parameter yang jelas, disertai dengan konsekuensi jika tidak dipatuhi. Fungsinya adalah mengarahkan tindakan dalam lingkup tertentu, memberikan kerangka kerja yang tegas namun fleksibel bagi pengambilan keputusan manajerial.¹⁶

Kebijakan pendidikan menekankan pentingnya melibatkan semua pihak, dalam merumuskan kebijakan. Proses kebijakan ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak untuk kemudian mengembangkan hasil diskusi secara bertahap.¹⁷ Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan dua aspek utama. Pertama, keputusan tersebut didasarkan pada seperangkat nilai yang dianut. Kedua, keputusan ini juga mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang relevan dengan situasi tertentu. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses analisis yang menyeluruh, di mana pembuat kebijakan tidak hanya berpedoman pada prinsip-prinsip ideologis, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata di lapangan.

¹¹ Abdul Muis Daeng Pawero, 'Arah Baru Perencanaan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan', *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.29062/dirasah.v4i1.177>.

¹² Adelia Rizky Alwiputri and Triana Rosalina Noor, 'Penguatan Kompetensi Siswa Melalui Program Magang Pada Dunia Usaha Dan Dunia Industri', *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 5, no. 2 (2024): 173.

¹³ Triana Rosalina Noor and Mazaya Razan Alsya Nur Shabrina, 'Strategi Pengembangan Sekolah Unggulan (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Kejuruan Migas, Cepu)', *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 223, <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.255>.

¹⁴ Arwildayanto, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, ed. Engkus Kuswandi (Bandung: CV Cendekia Press, 2018).

¹⁵ *Ibid*, 2.

¹⁶ Jumaira and Sumarto Warlizasusi, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam* (Bengkulu: Buku Literasiologi, 2022).

¹⁷ *Ibid*, 9.

Pendekatan ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang tidak hanya ideal secara teoretis, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap keadaan yang ada.¹⁸

Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai rangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga perumusan strategi dalam bidang pendidikan. Proses ini berpijak pada visi dan misi pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah menerjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam langkah-langkah konkret dan terukur.¹⁹

Penyusunan kebijakan merupakan persiapan yang terstruktur dan sistematis, yang dirancang untuk memastikan tujuan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Penyusunan kebijakan tersebut melewati beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.²⁰

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan pemahaman yang hanya sebatas pelajaran yang terkait dengan moral dan etika. Pemahaman yang tidak sepenuhnya akurat mengenai konsep pendidikan karakter ini telah menyebar luas dan tertanam dalam pikiran berbagai kalangan, termasuk orang tua, pendidik, serta masyarakat secara umum.²¹ Karakter dapat dipahami sebagai ciri fundamental, identitas pribadi, pola tingkah laku, dan kebiasaan yang konsisten. Dalam konteks yang lebih luas, karakter merujuk pada berbagai sifat yang dimiliki manusia, di mana sifat-sifat tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan seseorang.²²

Pendidikan karakter adalah upaya yang menyeluruh untuk membentuk kebiasaan dan cara berpikir yang baik di anak didik, sehingga mereka dapat hidup dan bekerja dengan harmonis dan bertanggung jawab di dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Artinya pendidikan karakter dapat diartikan sebagai karakteristik, moral, atau nilai-nilai yang membedakan seseorang dari orang lain.²³

Pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk membimbing individu dalam memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Konsep pendidikan karakter meliputi tiga elemen utama, yakni pemahaman terhadap kebaikan, kecintaan pada kebaikan, dan pelaksanaan kebaikan.²⁴ Pendidikan karakter mencakup memberikan ruang bagi individu untuk mengeksplorasi dan menghayati nilai-nilai yang

¹⁸ Selamat Ariga, 'Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 662–70, <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.225>.

¹⁹ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan 'Dari Filosofi Ke Implementasi'* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 37.

²⁰ Setiadi Hafid, *Teori Perencanaan* (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014).

²¹ Sri Zulfida, *Pendidikan Karakter Dalam Buku Ajar* (Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020), 42.

²² Ibid. 65.

²³ Sofyan Tsauri, *Pendidikan Karakter Peluang Dalam Membangun Karakter Bangsa* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 48.

²⁴ Hadion Indrawan, Irjus and Wijoyo, *Manajemen Pendidikan Karakter* (Banyumas: Cv Pena Persada Redaksi, 2020).

dianggap positif, mulia, dan patut untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan pribadi, hubungan sosial, dan spiritual.²⁵

Pendidikan karakter adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik.²⁶ Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha terencana dalam mengenalkan, merawat, dan menerapkan nilai-nilai agar peserta didik berkembang menjadi individu yang lengkap. Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai moral kepada anggota sekolah dengan melibatkan aspek pengetahuan, kesadaran, dan tindakan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan bangsa sehingga mencapai kesempurnaan manusia.²⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri, Jl. Hasyim Asy'ari No.162, Cumpleng, Bangsri, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mendeskripsikan terkait penyusunan kebijakan penguatan pendidikan karakter Islami siswa.²⁸ Adapun subyek penelitian pada penelitian ini melibatkan empat orang orang yakni Kepala madrasah, wakil kepala bagian kesiswaan, guru dan ketua komite yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan berdasar pada beberapa pertimbangan tertentu. Kepala madrasah dipilih posisinya berperan sebagai pengambil kebijakan atas lembaga pendidikan. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dipilih dengan dasar sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proram. Untuk pemilihan guru dengan pertimbangan sebagai pelaksana pendidikan karakter di madrasah dan pemilihan Ketua Komite dikarenakan komite madrasah berperan sebagai rekan sejawat dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak madrasah.

Adapun untuk teknik pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu wawancara mendalam (*Indepth Interview*), observasi partisipan (*Participant Observation*) dan studi dokumen.²⁹ Data yang telah dikumpulkan melalui teknik tersebut untuk selanjutnya dianalisis secara tunggal menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman yakni melalui proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁰

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kebijakan penguatan pendidikan karakter melalui beberapa proses penyusunan yakni formulasi kebijakan,

²⁵ Doni Albertus dan Koesoema, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

²⁶ Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri* (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010).

²⁷ Ibid 38.

²⁸ John W Cresswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 135

²⁹ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016). 309

³⁰ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition* (USA: Sage Publications, 2014). 34

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Ketiga proses perencanaan ini membentuk suatu siklus yang saling terkait dalam proses manajemen kebijakan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap ketiga tahap ini penting untuk mengelola kebijakan secara efektif, khususnya dalam konteks kebijakan pendidikan.³¹ Selain itu penyusunan kebijakan tersebut tidak hanya terpusat pada kepala madrasah, namun melibatkan beberapa pihak terkait agar kebijakan yang dihasilkan bisa mengakomodir semua kepentingan.

Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan langkah awal dalam proses perencanaan kebijakan. Tahapan ini berfungsi sebagai landasan untuk berbagai kegiatan yang akan diimplementasikan oleh pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri dalam menyusun kebijakan. MI Hasyim Asy'ari Bangsri ini memiliki tujuan utama untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu tajwid dan mampu menghafal Al-Qur'an, sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Proses formulasi kebijakan dilakukan dengan baik dengan melalui proses perumusan kebijakan telah terlaksana secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan kebijakan pendidikan karakter di Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk melakukan penyusunan sebuah kebijakan, dibutuhkan formulasi kebijakan yang tepat. Formulasi kebijakan merupakan suatu tahapan krusial dalam siklus pembuatan kebijakan publik yang berlangsung di lingkungan pemerintahan. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan berbagai pilihan atau alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan. kirakan dan disiapkan langkah antisipasinya terlebih dahulu.³²

Proses formulasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua aktivitas utama. Aktivitas pertama melibatkan penentuan garis besar tindakan yang perlu diambil, atau dengan kata lain, merumuskan konsensus mengenai opsi kebijakan yang akan dipilih. Kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari keseluruhan proses ini. Aktivitas kedua berfokus pada mekanisme pengambilan keputusan kebijakan. Dalam konteks ini, sebuah keputusan kebijakan mencakup tindakan yang diambil oleh pejabat berwenang atau institusi resmi untuk menyetujui, memodifikasi, atau menolak alternatif kebijakan yang telah diusulkan.³³ Namun terkadang formulasi kebijakan dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari isu-isu politik karena itu kebijakan yang ditetapkan harus selaras dengan perkembangan zaman dan bisa mengakomodir semua kepentingan. Aktivitas ini dapat digambarkan sebagai serangkaian tahapan yang saling terkait dan terurut, meliputi penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Formulasi kebijakan memuat beberapa elemen penting yang menjadi panduan tindakan, termasuk pihak-pihak yang terdampak kebijakan, jenis

³¹ Ibid,15.

³² Dwi Priyono Nugroho, *Analisis Kebijakan Publik* (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2014),31.

³³ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002),26.

dan manfaat yang dihasilkan, cara pelaksanaan program, serta sumber daya yang dibutuhkan.³⁴

Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di MI Hasyim Asy'ari Bangsri dilakukan dengan terlebih dahulu mengorganisasikan tanggung jawab kepada pihak pelaksana. Kepala sekolah mendelegasikan pelaksanaan rancangan program kebijakan pendidikan karakter dengan melibatkan peran komite sekolah dan guru untuk melaksanakan agenda program tersebut. Hal ini dikarenakan dalam kaitannya dengan implementasi tanggung jawab yang sudah diberikan oleh kepala sekolah untuk beberapa guru yang sudah ditugaskan, salah satunya peneliti mendapatkan data dari salah satu guru wali kelas. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan karakter ini, adapun peran guru wali kelas yang ikut serta menganalisis fenomena dari berbagai sudut pandang. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang baik terkait pelaksanaan program kebijakan pendidikan karakter.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan dan keputusan yang bertujuan untuk mengubah pernyataan kebijakan dari tahap formulasi menjadi praktik nyata dalam organisasi.³⁵ Implementasi kebijakan menjadi metode untuk mewujudkan tujuan suatu kebijakan secara tepat dan efektif. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat ditempuh. Pertama, kebijakan dapat langsung diimplementasikan melalui serangkaian program konkret. Alternatif kedua melibatkan penyusunan kebijakan turunan atau derivatif terlebih dahulu, yang kemudian menjadi dasar untuk implementasi.³⁶ Implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian aksi yang merupakan kelanjutan dari keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya. Proses ini melibatkan upaya-upaya untuk mentransformasikan keputusan-keputusan tersebut menjadi langkah-langkah operasional yang konkret dalam jangka waktu tertentu.³⁷

Tahap selanjutnya yakni alokasi tanggung jawab. Tujuannya adalah memastikan implementasi kebijakan pendidikan karakter pada siswa berjalan secara efisiensi dan efektivitas. Selain itu, kontribusi dari tenaga pengajar seperti pihak guru kesiswaan, komite sekolah, serta guru wali kelas juga memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi program kebijakan pengembangan pendidikan karakter pada siswa. Kerjasama dan koordinasi yang kondusif dengan berbagai pihak menjadi kebutuhan untuk menjamin adanya dukungan serta keterlibatan maksimal dalam mengimplementasikan pembentukan karakter siswa. Implementasi program-program kebijakan pendidikan karakter dapat terlaksana dengan adanya kerjasama yang baik.

Evaluasi Kebijakan

³⁴ Syafaruddin Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 16.

³⁵ Syafaruddin, 5.

³⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, UNISRI Pre. (Surakarta, 2020), 7.

³⁷ Ibid, 8

Review of Education Studies

Vol 1, No 2, Desember 2024, ISSN 3064-4321

Evaluasi menjadi tahap akhir dalam penyusunan kebijakan penguatan pendidikan karakter Islami siswa MI Hasyim Asy'ari. Program yang dilaksanakan akan ditelaah ulang untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan konsep yang telah dirumuskan sebelumnya.³⁸ Tahapan evaluasi ini memegang peranan krusial dalam proses penyempurnaan, menghindari terulangnya kekeliruan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Peran komite sekolah serta guru wali kelas dalam implementasi program juga dievaluasi, termasuk kemampuan mereka dalam menjadi model perilaku yang baik dan memfasilitasi pembelajaran karakter. Dukungan lingkungan sekolah, seperti kebijakan sekolah, dan fasilitas, dinilai untuk memastikan bahwa mereka mendukung dan memperkuat pesan-pesan pendidikan karakter. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi aspek penting, mengingat pembentukan karakter adalah upaya bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Indikator keberhasilan yang digunakan dalam evaluasi ini mencakup aspek-aspek yang dapat diukur, seperti peningkatan perilaku positif siswa, penurunan kasus pelanggaran disiplin, dan peningkatan prestasi akademik.³⁹ Umpan balik dari guru dan orang tua juga menjadi indikator penting untuk menilai persepsi tentang efektivitas program. Melalui analisis komprehensif ini, diharapkan dapat teridentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan atau penguatan, sehingga implementasi kebijakan pembentukan karakter dapat terlaksana dengan lebih baik pada masa yang akan datang.

Evaluasi kebijakan merupakan proses untuk mengukur efektivitas kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada semua pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana sasaran kebijakan telah tercapai dan mengidentifikasi kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai dalam kenyataan.⁴⁰ Evaluasi kebijakan menjadi sebuah proses pengkajian sistematis terhadap suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut. Dalam proses ini, para evaluator berusaha untuk mengukur apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil menghasilkan perubahan positif yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.⁴¹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan kebijakan penguatan pendidikan karakter Islami di Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Bangsri Sidoarjo telah diterapkan dengan efektif melalui proses penyusunan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan, pihak madrasah melakukan konsensus dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam rangka menyusun program pendidikan karakter yang tepat untuk diimplementasikan kepada siswa. Formulasi kebijakan ini mempertimbangkan masukan dan kebutuhan dari lingkungan sehingga bukan hanya

³⁸ Triana Rosalina Noor and Izzatul Islamiya, 'Analisis Faktor Manajemen Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam', *EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2023): 124, <https://doi.org/10.47077/edusiana.v10i2>.

³⁹ Triana Rosalina Noor and Putri Purwanti, 'Manajemen Layanan Bimbingan Konseling Di SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School Sidoarjo', *An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2024): 99.

⁴⁰ Ibid,10.

⁴¹ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),5.

Review of Education Studies
Vol 1, No 2, Desember 2024, ISSN 3064-4321

sebagai kebijakan yang tanpa tujuan. Pada tahap implementasi kebijakan, pihak madrasah melalui kepala sekolah mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaan program pendidikan karakter kepada wakil bidang kesiswaan untuk bisa mulai menerapkan dengan melibatkan peran guru dan orang tua. Adapun tahap berikutnya, pihak madrasah melakukan evaluasi kebijakan melalui mengukur ketercapaian efektivitas program pendidikan karakter yang dilakukan. Evaluasi tersebut dilakukan bukan hanya pada aspek program, namun juga pada pelaksana di lapangan yakni guru dan komite dalam teknis yang mengawasi dan mensosialisasikan program kepada siswa.

Review of Education Studies
Vol 1, No 2, Desember 2024, ISSN 3064-4321

Daftar Pustaka

- Abd. Madjid. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Edited by Alviana Cahyanti. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019.
- Albertus dan Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Alwiputri, Adelia Rizky, and Triana Rosalina Noor. 'Penguatan Kompetensi Siswa Melalui Program Magang Pada Dunia Usaha Dan Dunia Industri'. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 5, no. 2 (2024): 173–84.
- Ariga, Selamat. 'Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19'. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 662–70. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.225>.
- Arwildayanto. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Edited by Engkus Kuswandi. Bandung: CV Cendekia Press, 2018.
- Cresswell, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hafid, Setiadi. *Teori Perencanaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.
- Ilham, Ilham. 'Kebijakan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar'. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 2, no. 3 (2021): 154–61. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.70>.
- Indrawan, Irjus and Wijoyo, Hadion. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Banyumas: Cv Pena Persada Redaksi, 2020.
- Khan, Yahya. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*. Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010.
- Merentek Chanra, Theo. *Kebijakan Pendidikan*. Tomohon: Ukit Press, 2023.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. USA: Sage Publications, 2014.
- Noor, Triana Rosalina. 'Penanganan Perilaku Membolos Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan, Sidoarjo'. *Conseils: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.55352/bki.v4i2.659>.
- . 'The Strategy of Private Madrasah Tsanawiyah in Responding to Educational Challenges'. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 8, no. 2 (2024): 665–76. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i2.561>.
- Noor, Triana Rosalina, and Izzatul Islamiya. 'Analisis Faktor Manajemen Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam'. *EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2023): 124–38. <https://doi.org/10.47077/edusiana.v10i2>.
- Noor, Triana Rosalina, and Putri Purwanti. 'Manajemen Layanan Bimbingan Konseling Di SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School Sidoarjo'. *An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2024): 99–108.
- Noor, Triana Rosalina, and Mazaya Razan Alsya Nur Shabrina. 'Strategi Pengembangan Sekolah Unggulan (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Kejuruan Migas, Cepu)'. *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 223–40. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.255>.
- Nugroho, Dwi Priyono. *Analisis Kebijakan Publik*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2014.
- Nur, Sofia, Purwanto Purwanto, and Rochmat Budi Santoso. 'Tata Kelola Pembentukan Karakter Siswa Di Madrasah Kota Magelang'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7,

Review of Education Studies
Vol 1, No 2, Desember 2024, ISSN 3064-4321

- no. 2 (2021): 881–90. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2662>.
- Pawero, Abdul Muis Daeng. 'Arah Baru Perencanaan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan'. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 16–32. <https://doi.org/10.29062/dirasah.v4i1.177>.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Pre. Surakarta, 2020.
- Pratama, Enggar Dista. 'Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Di SMK Negeri 2 Pengasih'. *E-Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif-S1* 23, no. 1 (2018): 11–26.
- Rodiah, Siti, and Triana Rosalina Noor. 'Strategi Pengembangan Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Pendidikan KeIslaman Unggulan'. *IDEALITA: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2024): 121–36.
- Rusdiana, Ahmad. *Kebijakan Pendidikan 'Dari Filosofi Ke Implementasi'*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Setiawan, Farid, Annisa Septarea Hutami, Dias Syahrul Riyadi, Virandra Adhe Arista, and Yoga Handis Al Dani. 'Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam'. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 4, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.23971/mdr.v4i1.2809>.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafaruddin, Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Tsauri, Sofyan. *Pendidikan Karakter Peluang Dalam Membangun Karakter Bangsa*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Warlizasusi, Jumaira and Sumarto. *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*. Bengkulu: Buku Literasiologi, 2022.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Winarno, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Zulfida, Sri. *Pendidikan Karakter Dalam Buku Ajar*. Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020.